

RENJA
2023

RENCANA KERJA (RENJA)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2023



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah Nya dengan perkenan dan ridho Nya semata Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun 2023 ini dapat tersusun.

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 106 dan 139 Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa OPD harus menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setelah (RKPD) ditetapkan, untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 ini disusun dan merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan yang memuat penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian yang mengalami sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing OPD.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun 2023 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Magetan, 20 Juli 2022

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MAGETAN**



RUDY HARSONO, S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19681201 198903 1 013

DAFTAR ISI

Kata pengantar.....	I
Daftar Isi.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	14
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	19
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	20
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	20
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	20
3.3 Program dan Kegiatan	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	24
BAB V PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) Tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 mengacu pada RKPD tahun 2023. Disamping itu, penyusunan rancangan akhir Renja ini juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2019-2023 sampai dengan tahun 2021, serta usulan program serta kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terati langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah.

Selanjutnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 ini nantinya akan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran Tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembanguann dan keuangan daerah. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 496).
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-2889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2024.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005 - 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2021 nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan nomor 115).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022; (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2021 nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan nomor 116)
22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan tahun 2022; (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2021 nomor 32);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi capaian indikator kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan;
- b. Mereview, menyesuaikan dan mempertajam target-target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan;
- c. Menetapkan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun 2018-2024 ;
- b. Memberikan pedoman bagi seluruh bidang dan seksi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran Restra;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi
Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Renja OPD Tahun 2020 dilaksanakan untuk mengukur capaian kinerja OPD dalam melaksanakan anggaran Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022. Evaluasi mencakup realisasi target capaian kinerja keluaran program dan kegiatan Tahun 2021 terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan, yang bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan, menurut kategori urusan wajib dan pilihan Pemerintah Daerah. target kinerja yang dicapai seluruh OPD merupakan indikator capaian pelaksanaan pembangunan daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya.

Berikut disajikan tabel hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun 2021 :

Tabel T-C.29

Tabel T C 29 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2018 s.d. 2023			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021						Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tribulan 2 tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Potensi Gangguan Keamanan dan Ketenteraman Lingkungan yang Dapat Dikendalikan	75	%	8.205.000.000	36	%	854.146.983	45	%	1.063.718.475	36	%	854.146.983	80%	60	%	894.990.000	188.771.450	
			100	%		80	%		100	%		80	%			100	%			
			100	%		80	%		100	%		80	%							
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengamanan dan pengawalan event daerah kali Jumlah Penertiban Pelanggaran K3 kali Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Personil Jumlah Peserta Peningkatan Kemampuan SDM Personil	510 2541	Orang ; Kali	6.930.000.000	127 ; 519	Orang ; Kali	589.761.789	170 795	Orang ; Kali	790.274.750	127 ; 519	Orang ; Kali	589.761.789	75%	360	Kali	665.000.000	132.073.250	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah pengamanan dan pengawalan event daerah kali	1081	Kali	3.975.000.000	396	Kali	429.693.439	500	Kali	432.498.300	396	Kali	429.693.439	99%	400	Kali	500.000.000	99.838.350	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penertiban Pelanggaran K3 kali	1460	Kali	1.800.000.000	123	Kali	119.096.500	300	Kali	307.996.000	123	Kali	119.096.500	39%	400	Kali	100.000.000	24.999.150	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Personil	270	Orang	300.000.000	64	Orang	23.323.850	90	Orang	30.197.650	64	Orang	23.323.850	77%	90	Orang	45.000.000	7.235.750	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peserta Peningkatan Kemampuan SDM Personil	240	Orang	855.000.000	63	Orang	17.648.000	80	Orang	19.582.800	63	Orang	17.648.000	90%	50	Orang	20.000.000	-	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Laporan Pelanggaran Perda yang Ditangani Persen Persentase Penanganan Pelanggaran Perda oleh PPNS Persen	95	%	1.275.000.000	95	%	264.385.194	95	%	273.443.725	95	%	264.385.194	97%	95	%	229.990.000	56.698.200	
		Jumlah elemen masyarakat yang mendapatkan sosialisasi perda/perkada kelompok	12	Kelompok		3	Kelompok		3	Kelompok		3	Kelompok							
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah elemen masyarakat yang mendapatkan sosialisasi perda/perkada kelompok	95	%	600.000.000	3	Kelompok	37.115.146	3	Kelompok	44.000.000	3	Kelompok	37.115.146	84%	9	Kelompok	3.000.000	-	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Laporan Pelanggaran Perda yang Ditangani Persen	12	Kelompok	525.000.000	95	%	187.330.800	95	%	189.443.725	95	%	187.330.800	99%	95	%	103.433.000	36.288.550	

	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda oleh PPNs Persen	95	%	150.000.000	95	%	39.939.248	95	%	40.000.000	95	%	39.939.248	100%	95	%	123.557.000	20.409.650	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Pemadam Kebakaran	88	%	2.445.000.000	57	%	634.929.051	88	%	1.028.720.000	57	%	634.929.051	62%	88	%	1.853.502.000	60.600.000	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	12	Bulan	2.325.000.000	12	Bulan	625.404.051	12	Bulan	1.000.720.000	12	Bulan	625.404.051	62%	12	Bulan	1.843.502.000	60.600.000	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	12	Bulan	2.325.000.000	12	Bulan	625.404.051	12	Bulan	1.000.720.000	12	Bulan	625.404.051	62%	12	Bulan	1.843.502.000	60.600.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	10	Kelompok	120.000.000	1	Kelompok	9.525.000	3	Kelompok	28.000.000	1	Kelompok	9.525.000	34%	9	Kelompok	10.000.000	0	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Dinas/Instansi/Pokmas yang Mendapat Pelatihan Penanggulangan Kebakaran ; Jumlah Tenaga Pemadam Kebakaran yang Tersertifikasi	10	Kelompok	120.000.000	1	Kelompok	9.525.000	3	Kelompok	28.000.000	1	Kelompok	9.525.000	34%	9	Kelompok	10.000.000	-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Indeks kepuasan masyarakat	80	Angka	36.108.269.920	80	Angka	7.666.861.079	80	Angka	9.492.094.260	80	Angka	7.666.861.079	81%	79,5	Angka	8.735.502.550	1.617.411.447	
		- Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	100	%		100	%		100	%		100	%							
		- Persentase Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100	%		100	%		100	%		100	%							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14	Bulan	27.827.269.920	14	Bulan	7.107.376.799	14	Bulan	8.803.810.186	14	Bulan	7.107.376.799	81%	14	Bulan	8.260.068.550	1.559.879.737	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14	Bulan	27.818.269.920	14	Bulan	7.107.376.799	14	Bulan	8.803.810.186	14	Bulan	7.107.376.799	81%					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2	Dokumen	9.000.000	-	-	-	0	Dokumen	-	-	-	-		14	Bulan	8.257.068.550	1.559.879.737	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	210.000.000	12	Bulan	39.545.418	12	Bulan	49.409.024	12	Bulan	39.545.418	80%	2	Dokumen	3.000.000	0	
			180	Unit		40	Unit		60	Unit		40	Unit			12	Bulan	55.000.000	13.207.249	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	150.000.000	12	Bulan	26.286.418	12	Bulan	29.499.024	12	Bulan	26.286.418	89%					
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180	Unit	60.000.000	40	Unit	13.259.000	60	Unit	19.910.000	40	Unit	13.259.000	67%	12	Bulan	40.000.000	10.186.249	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	1.030.000.000	12	Bulan	209.277.800	12	Bulan	243.086.000	12	Bulan	209.277.800	86%	60	Unit	15.000.000	3.021.000	
			3	Unit		0	Unit		0	Unit		0	Unit			12	Bulan	185.634.000	18.583.761	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Bulan	170.000.000	12	Bulan	39.787.800	12	Bulan	43.089.500	12	Bulan	39.787.800	92%					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Bulan	760.000.000	12	Bulan	169.490.000	12	Bulan	199.996.500	12	Bulan	169.490.000	85%	12	Bulan	35.634.000	2.680.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	100.000.000	-	-	-	0	Unit	-	-	-	-		12	Bulan	150.000.000	15.903.761	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	1.350.000.000	12	Bulan	310.661.062	12	Bulan	368.890.050	12	Bulan	310.661.062	84%	12	Bulan	165.800.000	25.740.700	
			36	Unit																
			57	Buah																
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	420.000.000	12	Bulan	24.870.850	12	Bulan	49.900.450	12	Bulan	24.870.850	50%	12	Bulan	58.000.000	3.362.000	
			36	Unit												12	Bulan	15.000.000	2.337.200,00	
			57	Buah												12	Bulan	24.800.000	3.228.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	Bulan	90.000.000	12	Bulan	17.213.800	12	Bulan	20.799.200	12	Bulan	17.213.800	83%	12	Bulan	8.000.000	800.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	135.000.000	12	Bulan	30.274.500	12	Bulan	30.968.500	12	Bulan	30.274.500	98%	12	Bulan	10.000.000	1.855.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Bulan	60.000.000	12	Bulan	10.518.200	12	Bulan	11.299.900	12	Bulan	10.518.200	93%	12	Bulan	50.000.000	14.158.500,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12	Bulan	45.000.000	12	Bulan	6.900.000	12	Bulan	10.922.000	12	Bulan	6.900.000	63%	56	stel	60.000.000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	600.000.000	12	Bulan	220.883.712	12	Bulan	245.000.000	12	Bulan	220.883.712	90%	56	stel	60.000.000		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27	Dokumen	111.000.000	10	Dokumen	26.212.000	10	Dokumen	26.899.000	10	Dokumen	26.212.000	97%	10	Dokumen	9.000.000	0	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	24.000.000	4	Dokumen	7.600.000	4	Dokumen	7.600.000	4	Dokumen	7.600.000	100%	4	Dokumen	7.000.000	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Dokumen	87.000.000	6	Dokumen	18.612.000	6	Dokumen	19.299.000	6	Dokumen	18.612.000	96%	5	Dokumen	2.000.000	0	
					46.758.269.920			9.155.937.113			11.584.532.735			9.155.937.113			11.483.994.550	1.866.782.897		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) dan SPM, maupun terhadap indikator kinerja kunci (IKK).

Adapun hasil analisis kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C 30
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020 - 2021

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

ASPEK/FOKUS/BIDANG/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		OPD PENANGGUNG JAWAB
		TARGET RKPD	CAPAIAN	TARGET TAHUN KE 4 PERIODE RPJMD	PROYEKSI CAPAIAN RKPD	
Persentase Tingkat penyelesaian Penertiban Pelanggaran Perda/ Perkada (SPM)	%	96	101	97	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum (SPM)	%	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Persentase Laporan Peristiwa Kebakaran yang Ditindaklanjuti Dalam Kurun Waktu 15 Menit (SPM)	%	100	81	100	90	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kondisi kehidupan masyarakat yang dinamis tentram dan tertib baik tertib sosial maupun tertib hukum adalah tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan secara nyata sesuai dengan harapan masyarakat. Isu-isu strategis mendasar yang harus segera tertangani adalah sebagai berikut:

1. Penanganan masalah pelanggaran perda di tingkat kecamatan;
2. Peningkatan intensitas patroli di pusat-pusat keramaian, tempat pariwisata dan fasilitas umum;
3. Wilayah perbatasan sering terjadi masalah pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3);
4. Keberadaan Sosial Media menyebabkan maraknya penyebaran isu-isu/hoax;
5. Pemberdayaan linmas sebagai sarana deteksi dini gangguan di wilayahnya masing-masing.
6. Banyaknya kejadian kebakaran di wilayah yang jauh dari jangkauan Mako Satpol PP dan Damkar

Disamping isu tersebut yang tidak kalah penting adalah kesiapsiagaan personil dalam menghadapi kejadian insidentil, baik itu gangguan ketentraman dan ketertiban umum maupun kejadian kebakaran. Tahun 2023 akan ada penambahan sarana prasarana untuk mengoptimalkan penyelesaian masalah-masalah tersebut.

Saat ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan beranggotakan 103 personil, dimana jumlah tersebut masih sangat kurang untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas di lapangan. Penambahan sumber daya manusia dan sarana prasarana operasional yang mumpuni sangat dibutuhkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan sehingga tugas-tugas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dapat dilaksanakan secara optimal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Tabel TC 31
Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Magetan

Nama OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. MAGETAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Magetan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/perkada	95 Persen	2.573.157.150	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Magetan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/perkada	95 Persen	2.793.157.150	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	Jumlah pencegahan dan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban serta pemberdayaan tenaga perlindungan masyarakat	896 Kali	2.188.087.650	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	Jumlah pencegahan dan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban serta pemberdayaan tenaga perlindungan masyarakat	896 Kali	2.288.087.650	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Peraturan Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Peraturan Daerah	376 Kasus	1.802.949.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Peraturan Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Peraturan Daerah	376 Kasus	1.802.949.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	69.768.500	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	79.768.500	
5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas	Kab. Magetan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang	75.360.000	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas	Kab. Magetan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang	105.360.000	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Magetan	Jumlah sosialisasi pengawasan dan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/ walikota		385.069.500	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Magetan	Jumlah sosialisasi pengawasan dan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/ walikota		505.069.500	

	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok	3 Laporan	50.647.900	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok	3 Laporan	80.647.900	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	50 Laporan	173.386.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	50 Laporan	223.386.000	
6	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai	20 Laporan	161.035.600	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat	20 Laporan	201.035.600	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	Kab. Magetan	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Pemadam Kebakaran	88%	1.272.781.800	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	Kab. Magetan	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Pemadam Kebakaran	88%	1.366.196.200	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Laporan	1.247.413.800	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Laporan	1.325.828.200	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Laporan	1.247.413.800	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Laporan	1.325.828.200	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Magetan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap	90 Orang	25.368.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Magetan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap	90 Orang	40.368.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Magetan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	90 Orang	25.368.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Magetan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	90 Orang	40.368.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Magetan	Indeks kepuasan masyarakat 80 angka	80 angka	6.444.502.683	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Magetan	Indeks kepuasan masyarakat 80 angka	80 angka	6.401.726.253	

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31 Dokumen	23.355.750		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31 Dokumen	23.355.750	
7		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	12.900.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	12.900.000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	10.455.750		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	10.455.750	
8		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN/Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Bulan	5.697.328.633		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN/Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Bulan	5.599.906.003	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Magetan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	5.686.328.633		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Magetan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	5.588.906.003	
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	11.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	11.000.000	

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	252.378.300		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	267.378.300	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Magetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	117.006.900		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Magetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	127.006.900	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Magetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	20.893.600		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Magetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	25.893.600	
3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Magetan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	27.483.600		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Magetan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	27.483.600	

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Magetan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8.499.200		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Magetan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8.499.200	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	8.880.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	8.880.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	69.615.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	69.615.000	
4		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	229.510.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	244.156.200	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.646.200	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	17.310.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.310.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	182.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Magetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	182.200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	241.930.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Magetan	Jumlah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	266.930.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Magetan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Magetan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50.100.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Magetan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	191.830.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Magetan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	216.830.000	
--	--	--------------	--	---------	-------------	--	--	--------------	--	---------	-------------	--

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Magetan

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Magetan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Nihil				
1					
2					
3					
4					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu poin Prioritas Nasional adalah stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat kerja daerah yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah menegakkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Disamping itu saat ini Pemadam Kebakaran ikut bergabung menjadi satu kesatuan menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Melihat dari fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkup daerah yakni Kabupaten Magetan. Situasi daerah yang aman dan kondusif menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, situasi aman tentram dari potensi pelanggaran Perda dan Kejadian Kebakaran akan bisa diwujudkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

1. Tujuan

- Terwujudnya masyarakat yang ramah, tertib dan agamis

2. Sasaran

- Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran

Tabel T-C. 3.3
Target sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran tahun 2023 :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya masyarakat yang ramah, tertib dan agamis	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase penertiban pelanggaran Perda/Perkada	97 %
			Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum (SPM)	100 %
		Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran	Presentase laporan peristiwa kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit	100 %

3.3 Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
	a	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	a.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
	a.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
	a.3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	

	a.4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
	b	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	b.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	b.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	b.3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
	a	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	a.1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	b	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
	b.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	a.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	a.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	b.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	b.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	c	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	c.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	c.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	c.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	c.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	c.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	c.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	d.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	d.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

		d.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		e.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		e.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel T-C. 34

Tabel T-C. 34

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			10,290,441,633	10,290,441,633					
1	05	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat	80 Angka	6,444,502,683				80 Angka	6,444,502,683	
						Persentase Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100 Persen					100 Persen		
						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	100 Persen					100 Persen		
1	05	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			23,355,750				23,355,750		
1	05	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	12,900,000				10 Dokumen	12,900,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	10,455,750				9 Laporan	10,455,750	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,697,328,633					5,697,328,633	
1	05	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	5,686,328,633				100 Orang/bulan	5,686,328,633	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	11,000,000				12 Laporan	11,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			252,378,300					252,378,300	
1	05	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	117,006,900				12 Paket	117,006,900	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	20,893,600				12 Paket	20,893,600	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	27,483,600				12 Paket	27,483,600	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8,499,200				12 Paket	8,499,200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	8,880,000				24 Dokumen	8,880,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	69,615,000				24 Laporan	69,615,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Tabel T-C. 34

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1	05	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			229,510,000					229,510,000	
1	05	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30,000,000				12 Laporan	30,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	17,310,000				12 Laporan	17,310,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	182,200,000				12 Laporan	182,200,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			241,930,000					241,930,000	
1	05	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50,100,000				1 Unit	50,100,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	191,830,000				27 Unit	191,830,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	002			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran perda/perkada	100 persen	2,573,157,150				100 persen	2,573,157,150	
						Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/perkada	95 Persen					95 Persen		
1	05	002	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan dan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban serta pemberdayaan tenaga perlindungan masyarakat	896 kali	2,188,087,650				896 kali	2,188,087,650	
1	05	002	2.01	001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	376 Kasus	1,802,949,000				376 Kasus	1,802,949,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	002	2.01	002	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	520 Kasus	240,010,150				520 Kasus	240,010,150	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	002	2.01	004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	69,768,500				3 Dokumen	69,768,500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	002	2.01	005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang	75,360,000				100 Orang	75,360,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	002	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			385,069,500					385,069,500	
1	05	002	2.02	001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	2 Laporan	50,647,900				2 Laporan	50,647,900	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	002	2.02	002	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	50 Laporan	173,386,000				50 Laporan	173,386,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Tabel T-C. 34

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1	05	002	2.02	003	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	20 Laporan	161,035,600				20 Laporan	161,035,600	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	004			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Pemadam Kebakaran	88 %	1,272,781,800				88 %	1,272,781,800	
1	05	004	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			1,247,413,800					1,247,413,800	
1	05	004	2.01	002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Laporan	1,247,413,800				100 Laporan	1,247,413,800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	004	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			25,368,000					25,368,000	
1	05	004	2.04	001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	90 Orang	25,368,000				90 Orang	25,368,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

BAB V

PENUTUP

4.1 Catatan Penting

- a. Untuk keberhasilan pencapaian target Renja, semua pejabat pelaksana teknis kegiatan harus segera menindaklanjuti dengan penyusunan time schedule pelaksanaan kegiatan sehingga pekerjaan dapat diselsaikan tepat waktu
- b. Untuk menjamin sinergisitas dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan agar setiap pejabat pelaksana teknis kegiatan selalu melakukan koordinasi lintas bidang maupun instansi terkait agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

- a. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 ini merupakan pedoman dalam menyusun rencana program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2023;
- c. Untuk memastikan target-target di Renja tercapai, agar dilakukan evaluasi secara berkala sehingga dapat segera diketahui pelaksanaan program/kegiatan yang menemui kendala/masalah agar segera dapat diambil langkah-langkah antisipasi.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana kerja digunakan sebagai dasar dan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja masing-masing Bidang dan Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan. Oleh karena itu setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran disahkan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi untuk mencapai target pada setiap kegiatan sesuai dengan tugas bidangnya masing-masing, serta dilakukan evaluasi secara berkala setiap bulannya agar dapat diketahui progres pencapaian target beserta kendalanya.

Magetan, 20 Juli 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MAGETAN



RUDY HARSONO, S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19681201 198903 1 013